

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Ali Affandi. 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Pembuktian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andy Hartanto. *Panduan Lengkap Hukum Praktis. (Surabaya.: Kepemilikan Tanah Laksbang Justitia)*. 2015.
- Alwesius. 2022. *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Efendi Bachtiar. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni Press.
- Effendi Parangin. 1990. *Mencegah Sengketa Tanah*. Rajawali. Jakarta.
- H.M. Arba. 2015. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama. Bandung.
- Herlien Budiono. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ilhami Bisri. 2005. *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Imam Soetiknjo. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Irwan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola. Surabaya.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jayadi Setiabudi. 2015. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*. Penerbit Buku Pintar. Yogyakarta.
- Jur Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil. C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mochtar hasan. 2000. *Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Drela Corp.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan ke-9. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya. tanpa tahun.
- Prajudi Admosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Subekti. R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.
- _____. 2005. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradya Paramitha. Jakarta.
- _____. 2014. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. cet. pertama. Sinar Grafika. Jakarta
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sri Soedewi. M. (2005). *Hukum Perdata. Hukum Benda. Liberty. Yogyakarta.*
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Mengenal Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Suwoto Mulyosudarmo. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia: Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Tan Thong Kie. 2005. *Studi Notariat. Serba Sertbi Praktik Notaris*. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah: Skema Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Ekonomi Daerah*. Peradaban. Jakarta.
- Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.
- _____. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi. Wewenang dan Sifat Akta*. Kencana. Jakarta.
- Yanly Gandawidjaja. 2002. *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Jurnal

- Andi Batari Aninditha. Farida Patittingi. Chalis Al Rossi. 2021. "Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum". *Amanna Gappa*. Vol. 29 No. 2.
- Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Boedi Harsono. 2007. "PPAT Sejarah. Tugas Kewenangannya". *Majalah Renvoi*. Nomor 844. IV.
- Cahyowati. R. R.. & Djumardin. D. (2017). Kewenangan Camat Dan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Setelah Berlakunya Uujn. *NOTARIL Jurnal Kenotariatan*. 2(2).
- Cry Tendean. 2016. "Peralihan Hak Milik Atas Tanag Akibat Hibah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria". *Lex Privatum*. Vol. IV. No. 7.
- Ferica Indriani. dan Arsin Lukman. 2024. "Akta Hibah dari PPAT Sementara Camat yang Dibuat Tanpa Kehadiran Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/PDT/2023)". *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 4.
- Hadiyanti. A. R.. Safa'at. R.. dan Anshari. T. 2017. "Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah". *E-Jurnal Lentera Hukum*. Vol. 4. Issue 3.
- I Wayan Suardana. 2023. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah melalui Hubah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia". *Open Journal Systems*. Vol. 17. No. 9.
- Junaedi. Gunawan Djajaputra. 2022. "Tanggung Jawab PPAT Sementara dan Akibat Hukum Akta Jual Beli yang Dibatalkan melalui Putusan Pengadilan". *Jurnal Suara Hukum*. Vol.4 No.1.
- Muhammad Irsyad Aulad. Ahmadi Miru. Oky Deviany Burhamzah. 2020. "Penyelundupan Hukum melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Jual di Hadapan Notaris". *Amanna Gappa*. Vol. 28 No. 2.
- Muhammad Muhohar. dan Amin Purnawan. 2017. "Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta-Akta tentang Tanah (Studi di Kabupaten Boyolali)". *Jurnal Aktam* Vol. 4. No. 4
- Mira Sintya. 2024. "Proses peralihan Hak Atas Tanah

Melalui Hibah di Notaris dan PPAT Dr. Mahmud S.H.. M.Kn".
Jurnal Beinding. Vol. 1. No. 10.

Nursandi. N.. Budiarta. I. N. P.. Astiti. N. G. K. S.. 2022. "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata". Jurnal Analogi Hukum. 4 (3). 271-276.

Pieter Latumeten. "Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Serta Model Aktanya." makalah disajikan oleh Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia. Surabaya. 28 Januari 2009.

Sri Wahyuni Siagian. 2022. "Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomo5 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997". Jurnal Notarius. Vol. 2. No. 2.

Supriadi Jufri. Anwar Borahima. Nurfaidah Said. 2020. "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang". Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol. 4 No. 2.

Umbu Raya Paskah Kuladima. Iayla Kurniawati. dan Etin Indrayani. 2021. "Implementasi Kebijakan Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan di kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur". Visioner. Vol. 13. No. 2.

Urip Santoso. (2015). Hibah Tanah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Warga Negara Indonesia. Jurnal Perspektif. Volume 20 No 3.

Utari Amanda. Syamsuddin Muchtar. Marwah Marwah. 2021. "Tinjauan Yuridis Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan PPAT terhadap Akta Jual Beli". Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 24 No. 1.

Wulandari. KN Sofyan. dan Sri Suatmiati. 2021. "Efektivitas Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan di Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin". Jurnal Hukum Doctrinal. Vol. 6. No. 1.

Yulianto. A. R. (2024). *Peran Kantor Pertanahan Dalam Pengawasan Pembuatan Akta Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation. Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Peraturan Perundang-Undangan/Putusan pengadilan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Burgerlijk Wetboek

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris